

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal entitas tersebut (Halim, 2003:14).

Pihak eksternal yang memerlukan informasi yang diperoleh dari akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain: Departemen Pengaturan Keuangan, Donatur, Investor, Kreditor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat umum, dan instansi pemerintah yang semuanya berada dalam batas-batas akuntansi keuangan daerah tersebut.

###### **2.1.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat 1 menurut Abdul Hakim Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Ratmono dan Solihin, 2017:58)

Menurut Sadeli (2009:6) dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Akuntansi, bahwa Sistem akuntansi merupakan bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Untuk mencatat transaksi dan melaporkan hasilnya, Sistem Akuntansi mencakup prosedur, alat pencatatan, laporan, dan dokumentasi bukti transaksi.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah kumpulan proses manual dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasional pemerintahan, sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses, penyelenggara, alat, dan komponen lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, sistem akuntansi pemerintahan daerah mencakup berbagai tata cara dan teknik akuntansi untuk mengidentifikasi transaksi, mencatat dalam jurnal, memposting ke buku besar, membuat neraca saldo, dan menyajikan laporan keuangan,

sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

#### **2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah**

Nordiawan (2007:32) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya:

a) Tujuan Pertanggungjawaban

Tujuan tanggung jawab, sesuai dengan tujuan akuntabilitas, pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang menyeluruh, hati-hati, tepat waktu, dan tepat dalam format yang sesuai.

b) Tujuan manajerial

Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat membantu mencapai tujuan manajerial, yang meliputi penyediaan data keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian anggaran serta perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

c) Tujuan Pengawasan

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan harus memungkinkan otoritas pengawas untuk melakukan pemeriksaan agar pengawasan dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan.

#### **2.1.1.4 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan kredibel, menurut Mardiasmo (2004) dalam Ihsanti (2014). Sistem akuntansi pemerintah

daerah yang tidak memadai menyebabkan kurangnya pengendalian internal, sehingga pelaporan keuangan menjadi kurang dapat diandalkan dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Permadi (2013) berikut digunakan untuk menilai seberapa baik sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan: a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan persyaratan akuntansi pemerintah daerah. Standar akuntansi keuangan pemerintah harus diikuti ketika menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. karena akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah diatur oleh sistem akuntansi pemerintahan; b. Standar pencatatan akuntansi umum menjadi landasan prosedur pencatatan transaksi. Landasan praktik pencatatan akuntansi pemerintah daerah haruslah berpegang pada standar pencatatan akuntansi yang diakui secara luas; c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan dari pemerintah daerah adalah

Laporan keuangan yang disusun juga harus disampaikan secara berkala untuk pengambilan keputusan dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan indikasi keberhasilan suatu organisasi pemerintahan. Kemampuan pemerintah dalam menghasilkan dan menyampaikan laporan keuangan daerah yang berkualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai.

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli**

Laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak- pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014:2)

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. (PSAK No. 1, 2015: 1).

Status keuangan suatu entitas digambarkan dalam laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja keuangan entitas tersebut (Hidayat, 2018: 2).

### **2.1.2.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban; ekuitas dana; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas.

Namun secara spesifik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sementara itu, pemerintah daerah secara khusus bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ketika menyajikan laporan keuangan mereka: 1) Menyediakan data keuangan untuk memastikan dan memperkirakan arus kas, neraca, dan kebutuhan sumber daya keuangan

unit-unit pemerintah dalam jangka pendek; 2) Menyediakan data keuangan untuk memastikan dan meramalkan keadaan perekonomian suatu unit pemerintah dan segala perubahannya; 3) Menyediakan data keuangan untuk memonitor kinerja, mematuhi perjanjian, kontrak, dan ketentuan lain yang diamanatkan; 4) Menyediakan data untuk perencanaan dan penganggaran, serta memperkirakan bagaimana kepemilikan dan pengeluaran sumber daya keuangan akan mempengaruhi pencapaian tujuan operasional; 5) Menyediakan data untuk menilai kinerja manajerial dan organisasi.

### **2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (2009:2), bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

Pihak-pihak berikut memanfaatkan laporan keuangan menurut Hidayat (2018:9).

- a. Pihak yang meminjamkan uang atas jasa kepada suatu entitas yang disebut kreditur.
- b. Investor adalah orang-orang yang membeli saham suatu perusahaan atau eksekutif bisnis yang ingin mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangannya. Untuk membantu mereka memutuskan apakah

akan membeli, menahan, atau menjual investasi, mereka memerlukan informasi. Informasi yang membantu mereka mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga relevan bagi pemegang saham.

- c. Orang yang mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan komentar atas temuannya adalah akuntan publik.
- d. Karyawan adalah mereka yang dipekerjakan oleh suatu organisasi dan bergantung pada laporan keuangannya untuk menginformasikan keadaan organisasi tersebut. Untuk membantu mereka memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi, mereka memerlukan informasi. Informasi yang membantu mereka mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga relevan bagi pemegang saham.
- e. Organisasi yang bertugas memantau entitas publik dan mengevaluasi laporan keuangannya disebut Bapepam.
- f. Orang yang membeli barang atau jasa dari perusahaan yang mengajukan laporan keuangan disebut konsumen.
- g. Orang yang memasok barang ke organisasi yang mengajukan laporan keuangan dikenal sebagai pemasok. Informasi yang membantu kreditor perusahaan menentukan apakah jumlah utang akan dibayar tepat waktu merupakan hal yang penting bagi pemasok dan kreditor lainnya.



- h. Laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi perkembangan dan pendapatan pajak dari organisasi yang menghasilkannya. Pemerintah mempunyai kepentingan dalam operasional bisnis karena pemerintah mengendalikan banyak institusi yang pada gilirannya mempunyai kepentingan dalam bagaimana sumber daya dialokasikan. Untuk menetapkan kebijakan perpajakan, mengendalikan operasi bisnis, dan mengumpulkan data untuk statistik lainnya, termasuk statistik pendapatan nasional, mereka juga memerlukan informasi.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut PP No. 71**

#### **Tahun 2010**

Jika laporan keuangan mematuhi SAP pemerintah maka dianggap berkualitas (Irafah et al., 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan harus memenuhi standar normatif agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menguraikan tentang kualitas-kualitas yang menjadi standar kualitas informasi dalam laporan keuangan. Kualitas-kualitas ini meliputi:

- a. Relevan, laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang dikandungnya dapat membantu pengguna mengambil keputusan dengan memungkinkan mereka menilai peristiwa saat ini atau masa lalu, memperkirakan masa depan, dan memvalidasi atau menyesuaikan hasil evaluasi masa lalu. Hal ini memungkinkan

adanya koneksi data laporan keuangan terkait dengan tujuan pengguna. Berikut ini adalah contoh informasi terkait:

1. Menawarkan umpan balik (nilai umpan balik). Informasi mempunyai manfaat prediktif (predictive value) dan memungkinkan pengguna memverifikasi alat untuk menyesuaikan ekspektasi dari masa lalu.
2. Informasi dapat membantu pengguna dalam meramalkan masa depan dengan menggunakan data historis dan peristiwa terkini sebagai dasarnya.
3. Tepat Waktu Informasi disampaikan sesuai jadwal agar berdampak dan membantu dalam pengambilan keputusan.
4. Data akuntansi keuangan rinci dari pemerintah

b. Andal, Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas, tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Kualitas informasi yang dapat dipercaya berikut ini, yaitu:

- Penyajian jujur. Rincian secara akurat menggambarkan transaksi dan kejadian lain yang perlu diungkapkan atau yang dapat diantisipasi secara wajar untuk diungkapkan.

- Dapat Dikonfirmasi. Data dalam laporan keuangan dapat diuji, dan bahkan jika beberapa pihak melakukan pengujian terhadap data tersebut, sebagian besar hasilnya akan menghasilkan kesimpulan yang serupa.
  - Ketidakberpihakan. Informasi tidak bias terhadap kebutuhan pihak tertentu; melainkan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umum.
- c. Dapat dibandingkan mengacu pada kemampuan untuk membandingkan data dalam laporan keuangan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan organisasi lain secara umum.
- d. Dapat dipahami adalah kualitas data dalam laporan keuangan yang dapat dipahami konsumen dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.(Erni et al., 2018). Oleh karena itu, para pengguna dianggap memiliki informasi yang cukup tentang operasi dan aktivitas perusahaan pelapor, serta bersedia meninjau informasi yang relevan.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh lima faktor utama yang didasarkan pada unsur dan alur penyusunan laporan keuangan sebagai berikut (Pradono dkk, 2015): 1) Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dikenal dengan istilah kompetensi sumber daya manusia; 2)Teknologi

informasi berkaitan dengan sistem komputer, sistem informasi itu sendiri, dan pemanfaatan layanan yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas; 3) Apa yang Dilakukan PPK-SKPD Pejabat yang melaksanakan tugas penatausahaan keuangan SKPD disebut dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 4) Salah satu aspek terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang andal adalah rekonsiliasi. Hal ini karena berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi keandalan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 5) Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

#### **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kompetensi dan Kompetensi SDM**

###### **1. Pengertian Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*Knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Edison dkk. 2016:142)

Menurut Robin (2007:38), pengertian kompetensi yaitu suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang guna melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Di mana, kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.

Kompetensi kerja diartikan sebagai kemampuan kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kapabilitas ini meliputi pengetahuan, sikap kerja, dan kemampuan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan organisasi.

Kompetensi mengacu pada ciri-ciri mendasar individu yang dikaitkan dengan seberapa baik mereka menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi memberikan landasan untuk membedakan antara kinerja di bawah standar dan kinerja luar biasa. Mereka ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan individu atau organisasi.

## **2. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Komponen penting dalam membuat laporan keuangan berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia. Kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya manusianya serta kuantitas sumber daya manusianya mempengaruhi keberhasilannya. Yendrawati (2013) menyatakan bahwa pengertian kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Ketika digunakan di lingkungan pemerintahan, kompetensi SDM menggambarkan kemampuan dan kualitas yang dimiliki pekerja di instansi pemerintah, khususnya pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan memecahkan masalah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara profesional, efisien, dan sukses. (Sasmita et al., 2021).

#### **2.1.4.2 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sutrisno (2020:205) menyebutkan keunggulan keahlian dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sangat membantu dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan prosedur operasional perusahaan.
2. Perusahaan dapat memuaskan permintaan pelanggan dengan menggunakan kompetensi.
3. Agar sumber daya manusia dapat mencapai potensinya secara maksimal, kompetensi sangatlah membantu.

Kapasitas yang dimiliki seseorang dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan sifat kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerja dan memungkinkan tercapainya hasil yang diinginkan dikenal dengan istilah kompetensi sumber daya manusia (Sudiarti, 2020). Ketika kompetensi SDM tercapai maka kinerja juga akan berada pada puncaknya yang dapat membantu perusahaan atau instansi mencapai tujuannya.

#### **2.1.4.3 Indikator-Indikator Kompetensi SDM Menurut Ahli**

Menurut Andini (2015), Hutape dan Thoha (2008:8) mengidentifikasi tiga indikator atau komponen, yaitu sebagai berikut: a. Pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban spesifik pada bidang yang digelutinya. Keahlian atau informasi yang dimiliki seorang karyawan dapat dimanfaatkan di tempat kerja dalam keadaan sebenarnya. Berhasil atau tidaknya pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya

juga ditentukan oleh tingkat pengetahuannya; karyawan dengan pengetahuan yang memadai meningkatkan efisiensi entitas. b. Kemampuan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu atau kelompok. c. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Berikut ini menguraikan beberapa sumber penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil/Temuan Penelitian</b>
Tissa Nurul Husna (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)	Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer	Temuan studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut mempunyai dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan: kompetensi sumber daya manusia; sistem akuntansi keuangan daerah; penggunaan teknologi informasi; sistem pengendalian internal; dan peran inspektorat.
Henri Agustin, Lola Septiana, dan Efrizal Syofyan (2017)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Audit Internal (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)	Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi secara positif oleh kompetensi Sumber Daya Manusia. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak meningkat secara signifikan dengan adanya keterlibatan audit internal.
Alifah Annisa Dika (2022)	Pengaruh sistem akuntansi dan kompetensi sumber	Menggunakan data kuantitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel Sistem



	<p>daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep.</p>	<p>pengumpulan data primer</p>	<p>Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep; dan (2) variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.</p>
<p>Adawiyah R. M. Banoa, Harun Blongkod, Hartati Tulic (2022)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Boalemo (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo)</p>	<p>Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 4) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>
<p>Putri Nur Handaya, Rispantyo, dan Sunarti (2020)</p>	<p>Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui penerapan standar akuntansi</p>	<p>Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh</p>

	pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan jasa audit internal.		penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan fungsi audit internal secara bersamaan.
Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kartika Dwi Indrayani, Harjanti Widiastuti(2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi	Menggunakan data kuantitatif dengan pengumpulan data primer	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kemampuan sumber daya manusia dalam menerapkan sistem akuntansi sangat penting untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan.

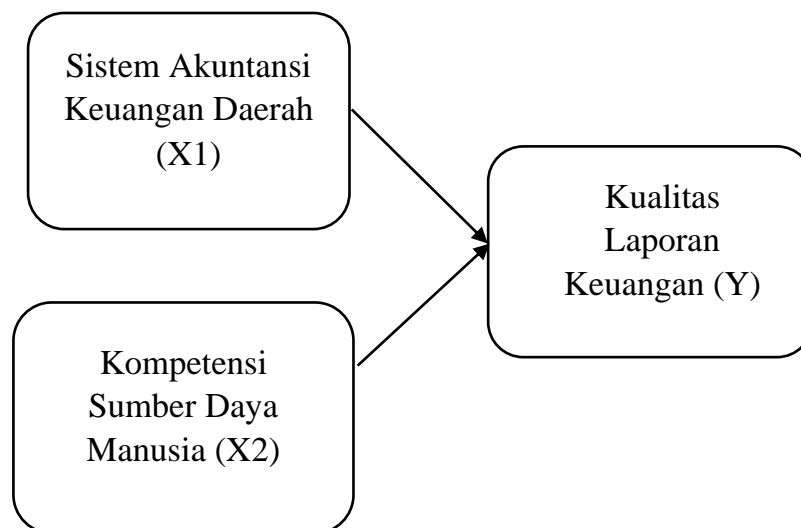
Kualitas pelaporan keuangan ditentukan oleh lima kriteria utama, sebagaimana dikemukakan oleh Pradono (2015): 1) Persaingan Sumber Daya Manusia; 2) Teknologi Informasi Dalam domain sistem informasi, teknologi berkaitan dengan sistem komputer dan pemanfaatan layanan tambahan yang menawarkan bantuan pengguna dalam menyelesaikan tugas; 3) Peran PPK-SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; 4) Rekonsiliasi; 5) Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dikenal dengan istilah kompetensi sumber daya manusia (Pradono, 2015). Sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu proses yang diawali dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan diakhiri dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Dwi Ratmono et al., 2017: 58). Sumber daya manusia yang berkualifikasi yang

memahami proses akuntansi dan bagaimana penerapannya sesuai dengan kriteria terkait diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas terbaik. (Sundari dan Rahayu, 2019).

Variabel bebas (tidak terikat) dan variabel terikat (terikat) merupakan dua variabel dalam penelitian ini. Sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM merupakan faktor independen dalam penelitian ini, sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependen. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen dan kedua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan berpikir mengenai topik yang diteliti. Berikut penjelasan kerangka penelitiannya:

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir**



*Sumber: Barus (2017)*

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono., 2009).

### **2.4.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Ratmono dan Solihin, 2017:58). Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan Husna (2018); Alifa (2022) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sehingga berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan sebuah hipotesis :

*H<sub>0</sub>: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

*H<sub>1</sub>: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

## **2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan menghasilkan hasil kinerja yang berkualitas tinggi. Kualitas LKPD yang dihasilkan tidak akan memenuhi kriteria jika lembaga penghasilnya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang buruk (Sundari dan Rahayu, 2019). Akibatnya, kualitas laporan keuangan akan dipengaruhi oleh keahlian sumber daya manusia. Menurut penelitian Indrayani dkk. (2020), Handaya dkk. (2020), dan Septiana dkk. (2017), kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sehingga berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan sebuah hipotesis:

*H<sub>0</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*

*H<sub>1</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan*

### **2.4.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses, penyelenggara, alat, dan komponen lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Komponen penting dalam membuat laporan keuangan berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia. Kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya manusianya serta kuantitas sumber daya manusianya mempengaruhi keberhasilannya. Menurut penelitian Safitir (2022), sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sehingga berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan sebuah hipotesis:

*H<sub>0</sub>: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*

*H<sub>1</sub>: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*